KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	**W.20-1448 .OT.02.02 Tahun 2025**
TANGGAL PEMBUATAN	**10 Maret 2025**
TANGGAL REVISI	**-**
TANGGAL EFEKTIF	10 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **Wahyu Eka Putra** **NIP 198105222000121002**

NAMA SOP : **PEMBERIAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI HUKUM DI POSYANKUMHAMDES**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
6. SK Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.20.323.HN.03.03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pos Layanan Hukum Desa/Kelurahan Dalam Rangka Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Tiap Kecamatan di Bali Tahun 2020;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Kemampuan Menguasai Materi
2. Kemampuan Mengoperasikan Komputer
3. Kemampuan Memverifikasi permasalahan Hukum

KETERKAITAN:

1. SOP Pembentukan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa
2. SOP Call Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Handphone
3. Internet
4. Buku

PERINGATAN :

Jika SOP Pemberian Layanan Konsultasi Hukum dan Informasi Hukum di Posyankumhamdes ini tidak berjalan maka masayarakat di Desa/Kelurahan tidak memperoleh informasi terkait permasalahan hukum

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		KaKanwil	Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Tim Kerja pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Posyankumhamdes	Penyuluh Hukum	Call Center	OBH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk melaksanakan layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes	MULAI							Data Posyankumhamdes	1 Hari Kerja	Penugasan Kakanwil	Terdapat SOP Pembentukan Posyankumhamdes di Bali
2	Menelaah tugas layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes dan menugaskan kepada Tim Kerja pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum								Penugasan Kakanwil	1 Hari Kerja	Penugasan Kadiv P3H	-
3	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes melalui Kelompok Kadarkum serta menyusun draft laporan pelaksanaan layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes		T						Penugasan Kadiv P3H	1 Hari Kerja	Konsep Pemberian Layanan Konsultasi dan Informasi Hukum oleh Kelompok Kadarkum di Posyankumhamdes	-
5	Memberikan layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes								Konsep Pemberian Layanan Konsultasi dan Informasi Hukum oleh Kelompok Kadarkum di Posyankumhamdes	8 Jam	Draft Laporan, Rujukan kepada Penyuluh Hukum/Call Center/OBH	Pemberian Pelayanan setiap hari kerja atau mengikuti hari kerja di desa
6	Jika Posyankumhamdes membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait konsultasi hukum (non litigasi) dapat menghubungi Penyuluh Hukum								Rujukan dari Posyankumhamdes dan Data Penyuluh Hukum	1 Jam	Hasil Konsultasi Hukum/Informasi Hukum	-
7	Jika Posyankumhamdes membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait informasi hukum dapat menghubungi Call Center								Rujukan dari Posyankumhamdes dan Nomor Call Center	1 Jam	Hasil Konsultasi Hukum/Informasi Hukum	-
8	Jika Posyankumhamdes membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait konsultasi hukum (litigasi) dapat menghubungi OBH								Rujukan dari Posyankumhamdes dan Data OBH	1 Jam	Hasil Konsultasi Hukum/Informasi Hukum	-
10	Meneliti, mengoreksi dan menyetujui draft laporan pelaksanaan layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes dan memberikan kepada Kakanwil								Draft Laporan	1 Hari Kerja	Draft Laporan yang telah diteliti, dikoreksi dan disetujui	-
11	Menyetujui dan menandatangani draft laporan pelaksanaan layanan konsultasi dan informasi hukum di Posyankumhamdes dan melakukan pemantauan secara berkala	SELESAI	Y						Draft Laporan yang telah diteliti, dikoreksi dan disetujui	1 Hari Kerja	Laporan yang telah ditandatangani	-

